

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

**“Agama dan Perdamaian: Perspektif
Multikultural”**

PRAWACANA

Amsal Bakhtiar

**The Contribution of Master Chin Kung in
World Peace and Interfaith Dialogue**

WACANA

Gadis Arivia

Multikulturalisme: Re-imagining Agama

Ponijan Liaw

**Tragedi Manusia dan Kemanusiaan:
Merajut Perdamaian dalam Perspektif
Agama Buddha**

I Ketut N. Natih

**Agama dan Perdamaian: Perspektif
Multikultural Menurut Agama Hindu**

Albertus Patty

**Meretas Akar Konflik dan Kekerasan:
Refleksi Protestan**

BOOK REVIEW

A. Bakir Ihsan

Relasi antar Agama dalam Perspektif Fiqih

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. VII, No. 1, 2005

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Said Agil H. Al-Munawwar
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Amsal Bakhtiar
Kautsar Azhari Noer
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri

Pemimpin Redaksi

Edwin Syarip

Anggota Redaksi

Wiwi Siti Sajaroh
A. Bakir Ihsan

Sekretariat

Suzanti Ikhlās

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, 15412
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Pre-discourse

- 1-10 **The Contribution of Master Chin Kung in World Peace and Interfaith Dialogue**
Amsal Bakhtiar

Articles

- 11-20 **Multikulturalisme: Re-imagining Agama**
Gadis Arivia
- 21-30 **Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Merajut Perdamaian dalam Perspektif Agama Buddha**
Ponijan Liaw
- 31-46 **Agama dan Perdamaian: Perspektif Multikultural Menurut Agama Hindu**
I Ketut N. Natih
- 47-58 **Meretas Akar Konflik dan Kekerasan: Refleksi Protestan**
Albertus Patty
- 59-72 **Beragama yang Fanatik Tanpa Sikap Ekstrem**
Amsal Bakhtiar
- 73-86 **Manajemen Konflik Negara terhadap Masyarakat Multikultural: Kasus Komunitas Muslim Australia**
M. Amin Nurdin

Book Review

- 87-94 **Relasi antar Agama dalam Perspektif Fiqih**
A. Bakir Ihsan

Document

- 95-112 **Upacara Slametan Gua Sam Poo Kong di Semarang dalam Perspektif Multikultural**
M. Ikhsan Tanggok
- 113-126 **Merangkai Perbedaan, Merayakan Perdamaian: Telaah Konflik antara Pribumi dan Etnis Cina**
Ulfah Fajarini

AGAMA DAN PERDAMAIAN: PERSPEKTIF MULTIKULTURAL

Fenomena kekerasan atas nama kepentingan kelompok, ideologi, bahkan atas nama agama masih juga tak lekang. Kekerasan yang dioperasikan baik melalui negara maupun melalui komunitas tertentu telah menghapus misi mulia kemanusiaan yang disuarakan oleh agama-agama. Ironisme agama dijadikan tameng untuk mengeruhkan suasana konflik yang terjadi. Kalau demikian, masih adakah harapan perdamaian yang dapat dipertaruhkan dari agama?

Semua agama hadir menawarkan perdamaian atau paling tidak dapat menjadi alternatif bagi sistem yang dianggapnya merugikan kehidupan sosial. Ajaran agung yang diwartakan agama telah menyesaki setiap masjid, gereja, sinagog, pure, vihara, klenteng, dan tempat persembahyangan lainnya. Masing-masing kitab suci telah diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa manusia. Agama hanyalah sebuah norma, aturan main, dan tatalaksana yang membutuhkan media, baik lembaga maupun perorangan. Begitu pun pengejawantahan misi perdamaian dalam agama, membutuhkan “tubuh” untuk membumikan dan menggerakkannya.

Inilah yang dilakukan oleh Master Chin Kung untuk membumikan ajaran langit perdamaian bagi kepentingan manusia di bumi. Atas komitmen dan perjuangan menegakkan perdamaian dunia yang digagas dan dipraktikkannya, Chin Kung bukan lagi sekadar sebuah nama, tapi telah menjadi ikon perdamaian yang lahir dari semangat keagamaan untuk kepentingan semua umat manusia. Universalitas perdamaian ditunjukkan oleh Chin Kung dengan memberikan bantuan kepada berbagai pihak bagi pengembangan sumber daya intelektual yang diharapkan menjadi benih bagi pewarisan nilai-nilai perdamaian. Ajaran mulia agama dijadikan Spirit untuk membantu orang-orang yang menghasrati dan berkomitmen bagi perdamaian tanpa terjebak pada sekat-sekat agama atau ideologi lainnya. Inilah yang ditelaah oleh Amsal Bakhtiar dalam tulisannya berjudul, *The Contribution of Master Chin Kung in World Peace and Interfaith Dialogue*.

Atas semangat dan komitmen untuk menebarkan perdamaian, maka jurnal **Refleksi** kali ini menurunkan tema besar “Agama dan Perdamaian:

Perspektif Multikultural.” Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewariskan sisi filosofis dan genealogis serta kemungkinan-kemungkinan perwujudan perdamaian di bumi manusia yang pluralistis baik dari segi budaya, suku, bahasa, dan agama. Lebih dari itu, jurnal ini mencoba melihat sejauh mana peran agama-agama, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, maupun Konghucu, dalam proses penciptaan perdamaian di tengah realitas yang multikultural. Agama yang dalam dirinya terkandung kebenaran mutlak harus berhadapan dengan kebenaran-kebenaran yang lain yang memiliki hak yang sama untuk eksis dan berinteraksi demi kedamaian di bumi. Dalam konteks ini Gadis Arivia mencoba merekonstruksi agama dalam perspektif multikulturalisme dengan meletakkan agama sebagai bentukan budaya. Menurutnya untuk memahami agama sebagai pijakan multikulturalisme harus diawali “oleh kesepahaman bahwa agama merupakan suatu realitas yang hadir dari berbagai teks yang berupaya menciptakan makna-makna dan imajinasi baru. Dengan demikian, komunalisme, yang menjadi pijakan bagi rekognisi identitas, harus dilebur demi mencairnya multikulturalisme dalam masyarakat. Perlu adanya rekognisi pluralitas atau politik perbedaan untuk menciptakan sebuah tata kehidupan yang saling menghargai dan bermartabat.

Terjadinya tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh beragam kepentingan, termasuk atas nama agama, lebih disebabkan oleh tidak adanya sinergi antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Ponijan Liaw melihat kunci persoalan yang harus diselesaikan demi tegaknya “damai di bumi” adalah dengan meretas aral yang mendistorsi ketiga pola hubungan tersebut. Dengan kata lain, krisis kemanusiaan yang lahir baik atas nama politik, kepentingan kelompok, maupun atas nama agama tidak akan pernah usai ketika manusia tidak mampu mencairkan pola hubungan yang harmonis antara dirinya dengan alam, manusia sekitar, dan pada dirinya sendiri, sehingga penghargaan agama terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak sekadar ajaran yang diagungkan, namun juga dirasakan.

Nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam agama dapat dilihat dari perincian ajaran yang ada di masing-masing agama. Dalam Hindu, menurut I Ketut N. Natih ada ajaran yang disebut dengan *universalisme*, *tattvam asi*, *ahimsa*, *svadhes*, *moksa artham jagat hita ya ca iti dharma* dan sebagainya. Ajaran ini sekaligus mengajarkan tentang pentingnya penghargaan yang sebesar-besarnya atas fenomena multikulturalisme dalam

masyarakat. Universalisme dalam Hindu, menurutnya, merefleksikan paham bahwa semua agama itu sama dan benar. Tidak ada satu pun agama yang paling baik dan paling benar. Semua agama sama, tidak ada satu pun yang lebih tinggi, lebih mulia dan lebih luhur.

Perdamaian tidak identik dengan kesamaan dan kesatuan, namun lebih pada adanya hak pada setiap orang untuk menikmati kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan dengan sesama. Menurut Albertus Patten senjakala perdamaian yang sekaligus menjadi akar konflik di antara umat berbagai agama disebabkan oleh banyak faktor. Namun secara garis besar dipilah dalam dua kategori, yaitu persoalan teologis dan non-teologis. Dari kedua sumber tersebut, yang utama adalah ketidaksiapan umat beragama untuk hidup dalam masyarakat dan dunia yang multikultural. Menurutnya, ketika rasionalitas gagal mewujudkan visinya dalam membangun peradaban manusia yang penuh damai, agama kembali ditantang untuk membuktikan peran profetiknya untuk menciptakan perdamaian di dunia ini. Itulah sebabnya dialog menjadi penting untuk membangun perdamaian itu. Dialog tersebut harus diletakkan dalam kerangka soteriologi, yaitu keselamatan, keselamatan manusia yang berisi kebebasan, keadilan, kesetaraan, perdamaian, dan keselamatan bumi dan planet ini.

Ikatan umat beragama dengan ajaran agamanya sering dianggap sebagai bagian dari proses terjadinya sekat-sekat sosial yang sekaligus dianggap sebagai duri bagi multikulturalisme. Menurut Amsal Bakhtiar dalam beragama setidaknya ada variabel yang harus dipahami dan disikapi secara proporsional, yaitu 'fanatik' dan 'ekstrem'. Kedua istilah ini memiliki implikasi yang berbeda dalam sikap keberagamaan. Fanatik yang dimaksud adalah sikap beragama yang saleh dan taat dalam menjalankan ibadah, yang termanifestasi dalam kehidupan individu maupun sosial. Adapun ekstrem adalah sikap beragama yang lebih literal, cenderung ideologis, dan eksklusif. Sikap eksklusif ini pada akhirnya dapat menjurus pada semangat komunalisme agama dan ideologisasi agama, sehingga yang muncul ke permukaan bukan agama yang sebenarnya, tetapi agama yang sudah terbungkus oleh berbagai kepentingan distorsif, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Konflik sesungguhnya bisa ditata menjadi energi yang positif bagi masyarakat yang multikultural. M. Amin Nurdin mengangkat kasus (negara) Australia dalam memanager konflik yang terjadi dalam masyarakatnya. Realitas sosial penduduk Australia yang beragam kultur, etnis, dan

agama sebagai implikasi terbukanya kebijakan imigrasi di tahun 1960-an telah mendorong pemerintah Australia untuk melakukan rekayasa sosial politik dengan menjadikan multikulturalisme sebagai ideologi negara. Kebijakan ini bertujuan untuk meredusir konflik nilai dan norma yang saling bertentangan antara masyarakat, kulit putih di satu pihak dan para pendatang di pihak lain. Implikasi multikulturalisme, tampak pada perkembangan komunitas muslim Australia -dan komunitas etnis dan agama lainnya—yang dilindungi warisan kultural mereka sehingga tetap *survive* hingga hari ini, meski tetap dicurigai memiliki potensi konflik.

Energi agama dalam merayakan multikulturalisme dapat dilihat pula dalam upacara slametan Gua Sam Poo Kong di Semarang yang dilakukan oleh orang-orang Cina atau Tionghoa yang menganut agama di luar Islam di Jawa. Menurut M. Ikhsan Tanggok upacara *slametan* dalam rangka membangun kembali gua Sam Poo Kong di klenteng Sam Poo Kong di Semarang, tidak sekadar upacara suci, tapi juga sebagai wadah menemukan dan mempersatukan dua kelompok suku bangsa yang berbeda secara kultur untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat.

Mengharapkan peran agama dalam mewujudkan perdamaian mengharuskan adanya kesepahaman pemeluknya terhadap ajaran agamanya, dan kesepahaman antar umat beragama itu sendiri. Dalam *Book Review*, A. Bakir Ihsan melihat adanya korelasi antara pemahaman keagamaan seseorang dengan sikapnya terhadap agama lain. Pemahaman yang eksklusif terhadap agama telah memicu lahirnya egosentrisme keberagamaan yang menganggap agama lain sebagai yang salah. Sikap ini terutama dipicu oleh orientasi *fiqhiyyah* yang cenderung hitam putih dan menafikan kebenaran yang lain. Orientasi *fiqhiyyah* yang bias inilah yang perlu direkonstruksi sehingga pemahaman sepihak dan eksklusif terhadap agama bisa mencair yang pada akhirnya akan meretas kebekuan interaksi antar umat beragama yang selama ini sering menjadi benih tragedi kemanusiaan yang tidak perlu. Dan inilah tema besar yang hendak diusung oleh jurnal ini bagi kepentingan perdamaian di muka bumi yang kita pijak bersama. Semoga!

Jakarta, April 2005
Redaksi

RELASI ANTAR AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQIH

A. Bakir Ihsan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

emailbakir@yahoo.com

Judul : Fikih Lintas Agama
Penulis : Nurcholish Madjid, dkk.
Penerbit : Paramadina, 2003; x + 274 halaman

Paradigma hegemonik di kalangan masyarakat muslim Indonesia saat ini adalah *fiqih oriented*. Segala bentuk perilaku dan sikap keberagamaan banyak dilandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan fikih. Term-term yang berkembang dalam konteks relasi sosial dikendalikan oleh kaidah-kaidah fikih yang cenderung hitam-putih. Begitu pun dalam konteks relasi antar agama. Terjalannya hubungan yang harmonis antar umat beragama selalu terkendala oleh jaring-jaring *fiqih oriented* yang dianggap final. Kaidah-kaidah agama ditafsirkan secara tekstual dengan mengabaikan realitas sosial yang terus berkembang dan kontekstual. Inilah yang hendak direkonstruksi oleh buku ini dalam konteks relasi antar agama. Fikih telah menyebabkan relasi antar agama menjadi statis dan mati. Seakan tak ada celah untuk membangun sebuah relasi baru yang lebih damai dan harmonis antara umat beragama demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Sehingga lahir istilah “kami” dan “mereka” untuk membedakan antara kelompok muslim dengan non-muslim. Kategori sosial ini kemudian memiliki implikasi lebih jauh berupa jarak yang dibangun atas nama agama. Bahkan konflik-konflik yang mewarnai sejarah dunia pun tidak terlepas dari kategorisasi yang dibangun di atas landasan fikih.

Luka sejarah karena konflik-konflik atas nama agama sering menjadi borok yang mudah basah kembali karena sikap dan penafsiran yang distingtif menyangkut agama lain. Langkah-langkah perdamaian yang dilakukan oleh berbagai pihak selalu terbentur oleh kesadaran distingtif antara kelompok “kami” dan “mereka”, antara umat ini dengan umat lainnya. Ini terjadi karena penempatan wahyu dan ajaran-ajaran turunannya sebagai realitas statis dan final yang tak lekang oleh perkembangan zaman.

Atas realitas inilah, rekonstruksi terhadap tafsir-tafsir agama termasuk fikih yang banyak menentukan haru biru kehidupan umat beragama menjadi sangat signifikan. Buku ini merupakan salah satu usaha untuk mengarah ke arah rekonstruksi tersebut dengan meletakkan fikih sebagai realitas progresif dan ramah terhadap semua agama. Sementara di dalam fikih yang hadir saat ini menyediakan kategorisasi-kategorisasi yang membangun sekat antara kawan yang identik dengan kebenaran dan lawan yang identik dengan kesalahan. Persoalan ini semakin rumit dengan adanya hierarki kebenaran. Para penafsir menjadi person yang diklaim sebagai pewaris nabi sehingga menjadi penentu kebenaran. Monopoli

kebenaran ini dengan sendirinya telah menutup pintu dialog, komunikasi dua arah, pluralitas, dan inklusivitas.

Kalau dilihat dalam konteks latar belakang pengetahuan, terlihat jelas bahwa bangunan pengetahuan, termasuk masalah fikih dibangun di atas banyak kepentingan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, baik yang bersifat personal maupun sosial. Bahkan kekuasaan politik menjadi bagian yang ikut menentukan lahirnya sebuah hukum atau keputusan. Oleh karena itu, bias pengetahuan di dalam setiap disiplin ilmu harus dilihat secara holistik sehingga tidak lahir sebuah upaya universalisme yang menafikan terhadap pandangan atau keputusan yang lain. Inilah, yang oleh buku ini disebut sebagai, fikih teosentris, fatalistik, dan konservatif (h. 135) yang melibatkan Tuhan dalam segala keputusannya sehingga tidak bisa diganggu gugat. Keterlibatan atau penerlibatan Tuhan dalam konteks ini sebenarnya secara tidak langsung telah menyempitkan kekuasaan Tuhan sesuai dengan selera manusia. Inilah yang hendak diverifikasi oleh buku ini, karena sejatinya Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk ditafsirkan dan dipahami dalam konteks budaya yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Ini semakin memperkuat asumsi bahwa pengetahuan tidak bebas nilai. Di dalamnya terkandung kepentingan dan kehendak-kehendak yang tidak bebas dari ruang dan waktu.

Menurut Nasr Hamid Abu Zaid bahwa kalam Tuhan yang maha agung telah dipahami secara literal sehingga ia dipahami apa adanya. Manusia diletakkan sebagai realitas statis yang tidak bergerak dan berpikir. Di sinilah paradoksalitas yang harus dicairkan dengan meletakkan teks-teks keagamaan sebagai pegangan manusia yang relatif, bukan pegangan Tuhan yang absolut.

Di samping faktor tafsir yang bersifat literal, intervensi kekuasaan dalam proses pembentukan pengetahuan sulit dinafikan. Keterlibatan kekuasaan dalam pengetahuan agama berlangsung sejalan dengan proses kodifikasi ilmu agama, baik ilmu kalam, tafsir, hadis, tasawuf, dan fikih. Menurut al-Dzahabī proses kodifikasi ini berlangsung sejak tahun 143 hijriah bersamaan dengan kekuasaan dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan al-Manshur. Negara waktu itu sangat mendukung terhadap proses kodifikasi tersebut. Dari sanalah lahir kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, fikih, dan hadis yang ditulis oleh beberapa ulama, seperti Ibnu Jarir, Malik, al-Awza'i, Sufyan al-Tsauri dan sebagainya.

Hambatan utama yang muncul dari proses kodifikasi ini adalah teosentrisme dan tekstualitas yang menjadi karakter dari kodifikasi tersebut, sehingga melahirkan kemandekan dan finalitas teks. Konteks sosial-budaya dan perkembangan menjadi mati di tengah absolutisme teks-teks. Yang tersisa kemudian adalah ruang penafsiran yang semu bagi agama sehingga tak ada inovasi kontekstual yang ramah terhadap perkembangan zaman.

Intervensi politik dalam pembentukan pengetahuan telah melahirkan korban-korban pemikiran yang seharusnya bisa diapresiasi demi kepentingan pengetahuan umat. Korban-korban ini adalah mereka yang berada di luar *mainstream* kehendak kekuasaan. Misalnya eksistensi ulama-ulama Syiah yang tersisih begitu saja dalam aras keputusan-keputusan *fiqhiyah*. Belum lagi diskriminasi gender yang begitu kentara dalam proses perjalanan khazanah keilmuan Islam.

Buku ini berangkat dari asumsi dasar bahwa agama berasal dari Tuhan yang sama, oleh karenanya tidak ada alasan teologis sedikit pun yang bisa menghambat relasi agama-agama. Kalaupun pada kenyataannya sering terjadi perbedaan bahkan konflik yang berlangsung antara umat beragama, itu lebih disebabkan oleh kepentingan-kepentingan yang awalnya bersifat politik, ekonomis, dan sosial yang kemudian dilegitimasi atas nama agama.

Kontinuitas sejarah kenabian menunjukkan adanya rangkaian misi yang saling terkait dari satu titik kebenaran, yaitu Tuhan. Kehadiran Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi merupakan landasan teologis sekaligus sosial (kultural) tentang relasi agama-agama. Paling tidak masing-masing agama merasa memiliki hubungan khusus dengan Nabi Ibrahim. Inilah yang dalam al-Qur'an disebut dengan ajaran yang sama (*kalimah sawa*). "*Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).'*" (QS. Āli 'Imrān [3]: 64). Berangkat dari logika dan ayat tersebut, maka dasarnya, agama memiliki misi yang sama khususnya dalam konteks kehidupan sosial, yaitu kemaslahatan bersama.

Dalam analisa yang lebih rinci, al-Syāṭibī mengulas tentang kemaslahatan dalam konteks interaksi sosial dalam tiga tingkatan. Pertama, *al-mashlahat al-dharuriyyat* (kemaslahatan primer), yaitu kemaslahatan yang

harus menjadi acuan dalam implementasi syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain implementasi syariat tidak boleh menafikan keragaman agama, tidak mengancam jiwa orang lain, tidak memperkosa kreativitas dan intelektualitas, tidak mengurangi hak reproduksi, dan tidak merampas harta atau kekayaan orang lain.

Kedua, *al-mashlahat al-hajiyat* atau kemaslahatan sekunder. Yaitu kemaslahatan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah, berupa keringanan karena adanya hambatan yang dibenarkan oleh agama. Dan implementasi ini tidak mengganggu terhadap tatanan sosial dan hukum yang ada. Misalnya keringanan dalam pelaksanaan ibadah bagi orang sakit, lemah, atau dalam perjalanan jauh.

Ketiga, *al-mashlahat al-tahsiniiyyat* atau kemaslahatan suplementer. Yaitu kemaslahatan yang terkait dengan etika dan estetika. Seperti kepedulian sosial, berbagi pada sesama, kebersihan, menjadi keindahan lingkungan dan sejenisnya.

Ketiga jenis kemaslahatan tersebut seperti setali tiga uang. Masing-masing saling terkait dan sangat penting dalam proses pengejawantahan nilai-nilai agama. Namun dalam konteks kehidupan sosial, kemaslahatan primer merupakan nilai yang sangat universal dalam realitas sosial yang plural. Ia terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang diagungkan oleh setiap agama.

Kalau ditarik pada dimensi keimanan, maka sebenarnya ketiga jenis kemaslahatan tersebut merupakan upaya pengejawantahan nilai-nilai agung keagamaan menjadi perilaku yang meringkai interaksi sosial. Dan di situlah kesempurnaan iman yang sesungguhnya, yaitu adanya penegasan secara verbal (*iqrar bi al-lisān*), membenaran secara hati (*tashdiq bi al-qalbi*), dan dimanifestasikan dalam bentuk perilaku (*al-'amal bi al-jawarih*).

Buku ini terbagi dalam empat bagian. Bagian pertama membongkar berbagai konsepsi yang selama ini dianggap final, seperti masalah kenabian, ahli kitab, dan tentang kebenaran. Dengan merekonstruksi terhadap konsepsi Islam sebagai agama kemanusiaan dan agama fitrah, bagian ini mengulas tentang ajaran agama yang mengarah pada proses kesamaan dan persamaan. Islam sebagai agama hanif dan penekanan pada kesamaan kitab suci.

Bagian kedua, mengulas tentang landasan *fiqhiyah* yang mengarah pada penghargaan terhadap keragaman ritual dan inklusivitas ajaran. Bagian ini tidak sekadar mengulas secara teoretis wacana keagamaan, tetapi pada praktik keagamaan sehari-hari, seperti mengucapkan salam pada non-muslim, mengucapkan selamat Natal, doa bersama, dan non-muslim masuk masjid.

Bagian ketiga menelaah upaya membangun sinergi agama-agama melalui reinterpretasi terhadap pemahaman *fiqhiyah*. Rekonstruksi terhadap pemahaman fikih menyangkut konsep *ahl al-dzimmah*, konsep *jizyah*, kawin beda agama, dan waris beda agama.

Bagian keempat, mengulas tentang perlunya meretas sekat-sekat keagamaan yang telah menorehkan sejarah kelam bagi eksistensi umat beragama. Yang diperlukan bukan hanya toleransi yang bersifat politis, tetapi melalui dialog yang terbuka dan berangkat dari hati nurani yang paling dalam bagi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dunia. Dialog bisa dilakukan dalam berbagai level, mulai dari dialog kehidupan, kerja sosial, sampai pada dialog teologis dan spiritual.

Upaya bagi terciptanya kedamaian dengan landasan spiritual inilah sebenarnya yang menjadi misi hakiki agama. Berbagai persoalan yang muncul dan menghambat proses pengejawantahan misi hakiki tersebut merupakan penyelewengan sejarah yang harus diluruskan kembali dengan membongkar seluruh dimensi kehidupan, baik menyangkut wacana atau kesadaran maupun yang telah mengkristal menjadi praktik-praktik kehidupan yang seakan telah menjadi ritual keagamaan yang sebenarnya menyimpang dari misi hakiki agama-agama itu sendiri. Kehendak ini harus menjadi kekuatan yang menggerakkan seluruh umat beragama untuk benar-benar melepaskan seluruh atribut yang justru menghambat bagi terselenggaranya kehidupan yang penuh kedamaian. Legitimasi teologis yang sering menjadi hambatan harus direkonstruksi, karena sesungguhnya agama adalah untuk manusia, bukan untuk Tuhan.

Sayangnya paradigma rekonstruktif ini secara tidak sadar terkadang terjebak pada eksklusivitas baru yang mematikan kehendak-kehendak penafsiran yang dalam perspektifnya dianggap menyimpang. Pola seperti ini cenderung menutup munculnya Varian-varian lain yang menjadi faktor atau alternatif penyelesaian bagi persoalan menguatnya eksklusivitas keagamaan. Oleh sebab itu, kehadiran wacana-wacana keagamaan baik yang ekstrem kanan, kiri, maupun upaya sintesis dalam konteks relasi

agama menjadi layak untuk selalu diapresiasi secara kritis, tanpa meninggalkan semangat terciptanya harmoni dalam kehidupan agama yang plural. Karena dengan begitu, bisa memberikan banyak jalan bagi penyelesaian membekunya kedamaian antara umat beragama. Bahwa tidak ada faktor yang paling dominan (tunggal) dalam sebuah transformasi.

Seperti diungkapkan pada mukadimah buku ini, bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan relasi antar agama melalui rekonstruksi dan dekonstruksi fikih lebih pada upaya verifikasi atas ajaran-ajaran yang telah dikembangkan oleh ulama terdahulu. Hal ini perlu ditekankan karena dalam perjalanan sejarahnya terjadi distorsi-distorsi dan deviasi akibat beragam kepentingan kekuasaan, sehingga yang lebih ditonjolkan dalam khazanah adalah diskursus kekuasaan. Ada nilai-nilai yang tersamarkan dalam fikih yang sebenarnya sangat signifikan untuk dikembangkan dalam konteks kehidupan sosial yang plural. Beberapa tema krusial yang diangkat dalam buku ini meliputi redefinisi term *ahl al-kitab*, *ahl al-dzimmah*, mengucapkan salam kepada non-muslim, kawin beda agama, non-muslim masuk masjid, dan waris beda agama.

Secara sadar buku ini hadir dengan paradigma yang berbeda dengan sebagian kaum muslim dalam melihat beberapa tema krusial tersebut. Terjadinya perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan paradigma dalam melihat produk hukum, bukan karena suatu penyimpangan atau merupakan produk pemikiran yang liar. Karena buku ini juga berangkat dari satu sumber yang sama, yaitu fikih atau wacana yang telah dikembangkan oleh ulama sebelumnya dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis. Dan inilah dinamika intelektual yang sama-sama memiliki hak untuk hidup sebagai bagian dari lautan pengetahuan yang bisa memberikan kesejukan di tengah kedahagaan umat. Bukankah, sebagaimana al-Syāṭibī di atas, dalam hidup ini ada kemaslahatan primer yang harus dikedepankan demi kepentingan bersama, termasuk hak untuk berkreasi secara intelektual. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali berpikir bahwa buku ini berpretensi untuk menafikan dan menegasikan wacana yang lain. Inilah bentuk tawaran dari paradigma yang berbeda dalam melihat fenomena sosial, khususnya dalam konteks relasi agama-agama. *Wallāhu a'lam.* []

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004